

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian atau karya ilmiah yang memiliki kemiripan dan menyinggung tentang pembahasa yang penulis lakukan, diantaranya :

Tabel 2.1. Penelitian terdahulu

Nama	Jenis	Judul	Fokus Pembahasan	Metode Analisis
Olera Weya, Amran T. Nauko, dan George Manuel Kawung	Jurnal	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah dan PDRB di Provinsi Papua. ¹	Retribusi daerah dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Papua	Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi Sederhana
Sinta Wulandari, Eko Budi Sulistio	Jurnal	Otonomi Khusus dan Dinamika Perekonomian di Papua. ²	Kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua.	Analisis data kualitatif yang tahapannya terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
Yeniwati	Jurnal	Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi di Sumatera. ³	Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan yang ada di provinsi Pulau Sumatra priode 2006-2011.	Indeks Ketimpangan Williamson, Regresi OLS
Tutik Yuliani	Jurnal	Pertumbuhan Ekonomi dan	Pembuktian apakah Hipotesis U	Analisis korelasi(korelasi

¹Olera Weya, dkk. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah dan PDRB di Provinsi Papua*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 15, No. 05. 2015. hlm. 59-66

²Sinta Wulandari, Eko Budi Sulistio. *Otonomi Khusus dan Dinamika Perekonomian di Papua*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.4, No.1, Januari–Juni 2013. hlm. 78-92

³Yeniwati, *Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi Di Sumatera*. Jurnal Kajian Ekonomi, Volume II, No. 03. Tahun 2013.

		Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten di Kalimantan Timur. ⁴	terbalik berlaku di Propinsi Kalimantan Timur priode 2010-2012	pearson) antara pertumbuhan ekonomi dan indeks Williamson
Doni Mahardiki dan Rokhedi Priyo Santoso	Jurnal	Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Indonesia. ⁵	Menganalisis seberapa besar dan perkembangan tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia selama periode 2006-2011. Mengklasifikasikan wilayah/provinsi di Indonesia berdasarkan pola dan struktur pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan (PDRB) per kapita.	Indeks ketimpangan Williamson dan Indeks ketimpangan Entropi Theil, sedangkan perkembangan distribusi pendapatan dengan Paired Sample T-Test. Analisis pola pertumbuhan menggunakan teknik Tipologi Klassen
Denny Iswanto	Jurnal	Ketimpangan Pendapatan Antara Kabupaten/Kota Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015. ⁶	Menganalisis besarnya disparitas antar daerah dan pertumbuhan ekonomi, mengklasifikasi daerah di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa	Analisis pertumbuhan ekonomi, Location Quotient (LQ), Shift-share, Tipologi Sektoral, Tipologi Klassen, Indeks Williamson,

⁴ Tutik Yuliani, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten di Kalimantan Timur*, Jejak (Journal Of Economics and Policy), Vol.VIII, No. 01. Tahun 2015. hlm. 45-53

⁵ Doni Mahardika, Rokhedi Priyo Santoso, "Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Indonesia 2006-2011". Jejak (Journal Of Economics and Policy). Vol. 6. No. 2, 2013, hlm 182-184

⁶ Denny Iswanto, *Ketimpangan Pendapatan Antara Kabupaten/Kota Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015*, Signifikan, Vol. 4 No. 1. April 2015, hlm. 41-66

			Timur berdasarkan laju pertumbuhan dan pendapatan perkapitanya	Indeks Theil, Korelasi Pearson dan menguji berlakunya Hipotesis Kusnetz
Ern Panca Kurnasih	Jurnal	Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian Terhadap Hipotesis Kuznet. ⁷	Menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Barat dan untuk membuktikan apakah hipotesis Kuznet tentang kurva U terbalik berlaku di Provinsi Kalbar	Regresi linear menggunakan data panel tahun 2001–2010, sedangkan untuk mengkalifikasikan wilayah digunakan analisis Klasen Tipologi.
Muhamad Ismail	Jurnal	Strategi Pengembangan Ekonomi Rakyat di Provinsi Papua. ⁸	Mengukur pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua, dan pengembangan ekonomi kerakyatan di Papua	Menggunakan analisis SWOT, menggunakan data primer dan sekunder
Kristian Hariyono Putro	Jurnal	Perencanaan Pembangunan di Papua dan Bonus Demografi 2020. ⁹	Ketimpangan dalam komposisi demografi masyarakat Papua yang dapat	Metode komparasi perbandingan komposisi demografi di

⁷ Ern Panca Kurnasih,. “Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian Terhadap Hipotesis Kuznet”. Jurnal EKSOS, Vol. 9, No.01. 2013. hlm. 36-48

⁸ Muhamad Ismail,. “Strategi Pengembangan Ekonomi Rakyat di Provinsi Papua”, Jurnal Bina Praja, Volume. 7, No. 3 Edisi September 2015. hlm 251 - 260

⁹ Kristian Hariyono Putro,. *Perencanaan Pembangunan di Papua dan Bonus Demografi 2020*., Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, Volume. 2, No 1, Juni 2016, hlm. 49 - 69

			menghambat kesempatan menikmati bonus demografi 2020.	Papua dan menganalisa secara deskriptif.
Olera Weya, dkk	Jurnal	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah & PDRB Provinsi Papua. ¹⁰	Berapa besar pendapatan asli daerah memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua.	Analisis regresi sederhana dan deskriptif.

Berdasarkan hasil penelusuran beberapa tesis dengan judul dan pokok permasalahan seperti yang dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa penelitian yang sama dengan judul "Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Papua Tahun 2011-2015 telaah Ekonomi Islam" belum ada yang membahasnya. Oleh karena itu, penelitian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah orisinalitas atau keasliannya.

Judul	Nama	Jenis	Fokus Pembahasan	Metode Analisis
Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Papua Tahun 2011-2015 telaah Ekonomi Islam	Moh Agus Nugroho	Tesis	Menghitung tingkat kesenjangan ekonomi dengan PDRB per kapita 2011-2015, dan bagaimana ekonomi Islam dalam melihat kesenjangan tersebut	Menggunakan Indeks Williamson untuk menghitung tingkat kesenjangan antar kabupaten, kemudian mendeskripsikannya dan menganalisis dengan pendekatan ekonomi Islam

¹⁰ Olera Weya, dkk., *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah & PDRB Provinsi Papua*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 15, No. 05 Tahun 2015. hlm 69-65.

B. Kerangka Teori

Adapun landasan teoritis yang dimaksudkan berhubungan dengan Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Papua Tahun 2011-2015 telaah Ekonomi Islam; Teori ketimpangan pendapatan, kesenjangan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi dan konsep ekonomi berkeadilan dalam Islam.

1. Teori Konsep Ekonomi Islam

Islam mengambil suatu kaidah terbaik antara kedua pandangan yang ekstrim (kapitalis dan komunis) dan mencoba untuk membentuk keseimbangan di antara keduanya (kebendaan dan ruhaniah). Keberhasilan sistem ekonomi Islam tergantung pada seberapa jauh penyesuaian yang dapat dilakukan diantara keperluan kebendaan dan keperluan ruhani/etika yang diperlukan manusia.¹¹

Adapun dasar-dasar dari ekonomi Islam yang kita kenal sekarang ini meliputi:

- 1) Bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, baik didunia dan diakhirat
- 2) Hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula
- 3) Dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlantar
- 4) Dalam harta benda itu, terdapat hak untuk orang miskin yang selalu meminta, karena itu, harus dinafkahkan sehingga dicapai pembagian rezeki
- 5) Pada batas tertentu, hak milik relatif tersebut dikenakan zakat
- 6) Perniagaan diperkenankan, tetapi riba dilarang
- 7) Tiada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerjasama dan yang menjadi ukuran perbedaan adalah prestasi kerja.¹²

¹¹ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 257.

¹² *Ibid*, hlm. 259-260

Sedangkan yang menjadi landasan dan tumpuan tegaknya sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai dasar sistem ekonomi Islam meliputi:
 - a) Hakikat kepemilikan
 - b) Keseimbangan ragam aspek dalam diri manusia
 - c) Keadilan antar sesama manusia
- 2) Nilai instrumental sistem ekonomi Islam meliputi:
 - a) Kewajiban zakat
 - b) Larangan riba
 - c) Kerjasama ekonomi
 - d) Jaminan sosial
 - e) Peranan negara
- 3) Nilai filosofis sistem ekonomi Islam meliputi:
 - a) Sistem ekonomi Islam bersifat terikat yakni nilai
 - b) Sistem ekonomi Islam bersifat dinamik, dalam arti penelitian dan pengembangan berlangsung terus-menerus
- 4) Nilai normatif sistem ekonomi Islam meliputi:
 - a) Landasan akidah
 - b) Landasan akhlak
 - c) Landasan syariah
 - d) Al-Qur'anul Karim
 - e) Ijtihad.¹³

Dalam Islam, motif aktivitas ekonomi lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar yang tentu ada batasnya, meskipun bersifat dinamis sesuai dengan tingkatan ekonomi masyarakat pada saat itu. Sementara itu, dari berbagai ayat Al-Qur'an bahwa segala yang ada dilangit dan dibumi akan dapat mencukupi kebutuhan manusia.¹⁴

Dengan demikian, ekonomi dalam Islam sangat menekankan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 5.

kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Illahiah.¹⁵

2. Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi, biasa dikenal dengan istilah kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan jurang antara kaya dan miskin, mengacu pada persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok, kelompok dalam populasi, atau antarnegara. Para ekonom umumnya mengakui tiga ukuran kesenjangan ekonomi: kekayaan, pendapatan, dan konsumsi. Persoalan kesenjangan ekonomi mencakup kesetaraan ekonomi, kesetaraan pengeluaran, dan kesetaraan kesempatan.¹⁶

Kesenjangan adalah masalah sosial yang semakin berkembang. Kesenjangan yang terlalu besar cenderung merugikan karena kesenjangan ekonomi dan pemusatan kekayaan mampu menghambat pertumbuhan jangka panjang. Pada tahun 2011, peneliti Dana Moneter Internasional menunjukkan bahwa kesetaraan ekonomi atau pendapatan yang lebih besar berkurangnya kesenjangan meningkatkan durasi pertumbuhan ekonomi sebuah negara dengan

¹⁵*Ibid*, hlm.7

¹⁶ Fletcher, Michael . "Research ties economic inequality to gap in life expectancy". Washington Post. https://www.washingtonpost.com/business/economy/research-ties-economic-inequality-to-gap-in-life-expectancy/2013/03/10/c7a323c4-7094-11e2-8b8d-e0b59a1b8e2a_story.html?utm_term=.0bc2ddee1cf2. Diakses pada Kamis, 16 Februari 2017. Pukul 19.17 WIB.

lebih cepat dibandingkan perdagangan bebas, korupsi pemerintah rendah, investasi asing, atau utang luar negeri rendah.¹⁷

Kesenjangan ekonomi bervariasi tergantung masyarakat, waktu, struktur ekonomi, dan sistem. Istilah tersebut dapat mengacu pada persebaran pendapatan atau kekayaan lintas lapisan masyarakat pada waktu tertentu, atau pendapatan dan kekayaan seumur hidup dalam jangka panjang. Ada beberapa indeks numerik untuk mengukur kesenjangan ekonomi. Di antara metode pengukuran kesenjangan yang ada, koefisien Gini merupakan indeks yang paling terkenal.¹⁸

Kesenjangan yang lebar tak hanya berakibat pada ekonomi, tetapi juga amat besar dampaknya terhadap kondisi psikologi bangsa. Maka boleh dikatakan bahwa “kesenjangan adalah kerawanan yang besar”. Hal ini juga berlaku bagi bangsa Indonesia. Substansi dari kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Masalah kesenjangan adalah masalah keadilan, yang berkaitan dengan masalah sosial. Masalah kesenjangan mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan.¹⁹

Pemerataan yang lebih adil di negara berkembang merupakan suatu kondisi atau syarat yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semakin timpang pendapatan atau ekonomi di suatu negara akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan ekonomi antar daerah, tergantung dari besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penerima

¹⁷ Easterly, W., "Inequality does cause underdevelopment: Insights from a new instrument". *Journal of Development Economics*. Vol. 84. No. 2. Tahun 2007. hlm. 755–776.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Oman Sukmana, *Sosiologi dan Politik Ekonomi*, (Malang: UMM Press, 2005) hlm. 35

pendapatan dalam daerah tersebut, baik itu golongan masyarakat maupun wilayah tertentu dalam daerah tersebut. Perbedaan jumlah pendapatan yang diterima itu menimbulkan suatu distribusi pendapatan yang berbeda, sedangkan besar kecilnya perbedaan tersebut akan menentukan tingkat pemerataan pendapatan (kesenjangan ekonomi) daerah tersebut. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan ini tergantung dari besar kecilnya perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh penerima pendapatan.²⁰

3. Disparitas Pendapatan

Timpang atau tidak adanya pendapatan daerah dapat diukur melalui distribusi penerimaan pendapatan antar golongan masyarakat ataupun antar wilayah tertentu dimana pendapatan yang diterima wilayah tersebut terlihat pada nilai PDRB-nya, sedangkan golongan masyarakat tentunya adalah jumlah yang diterimanya. Ketimpangan pendapatan lebih besar terjadi di negara-negara yang baru memulai pembangunannya, sedangkan bagi negara maju atau lebih tinggi tingkat pendapatan cenderung lebih merata atau tingkat ketimpangannya rendah. Negara-negara maju secara keseluruhan memperlihatkan pembagian pendapatan yang lebih merata dibandingkan dengan negara-negara dunia yakni negara-negara yang tergolong sedang berkembang.²¹

Beberapa teori ketimpangan distribusi pendapatan dapat dikatakan dimulai dari munculnya suatu hipotesa yang terkenal yaitu Hipotesis U terbalik (inverted U curve) oleh Simon Kuznets tahun 1955. Beliau berpendapat bahwa

²⁰ Todaro, M. P & Smith, S. C. *Pemnggunaan Ekonomi*. Terjemahan H. Munandar, Edisi Kesembilan Jilid I. (Jakarta: Erlangga. 2006), hlm.

²¹ Eva Baharuddin, "*Analisis Kesenjangan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo Periode 2006-2010*", Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, hlm. 9

mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Ketimpangan distribusi pendapatan tidak terlepas atau sangat erat hubungannya dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua Negara di dunia.

Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembangian hasil pembangunan suatu Negara dikalangan penduduknya. Distribusi pendapatan sebagai suatu ukuran dibenakan menjadi dua ukuran pokok, baik untuk tujuan analisis maupun untuk tujuan kuantitatif yaitu pertama: pendapatan “personal” atau distribusi pendapatan berdasarkan ukuran atau besarnya pendapatan. Distribusi pendapatan pribadi atau distribusi pendapatan berdasarkan besarnya pendapatan paling banyak digunakan ahli ekonomi. Distribusi ini hanya menyangkut orang per orang atau rumah tangga dan total pendapatan yang mereka terima, dimana pendapatan yang mereka peroleh tidak dipersoalkan. Tidak dipersoalkan pula berapa banyak yang diperoleh masing-masing individu, apakah merupakan hasil dari pekerjaan mereka berasal dari sumber-sumber lain. Selain itu juga diabaikan sumber-sumber pendapatan yang menyangkut lokasi dan jenis pekerjaan.

Kedua: distribusi pendapatan “fungsional” atau distribusi pendapatan menurut bagian factor distribusi. Sistem distribusi ini mempertimbangkan individu-individu sebagai totalitas yang terpisah-pisah. Keadaan distribusi pendapatan di beberapa negara dapat digambarkan dalam 2 (dua) hal yaitu: pertama: perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai

golongan penerima pendapatan dan golongan ini didasarkan pada besar pendapatan yang mereka terima. Ahluwalia menggolongkan penduduk penerima pendapatan yakni 40 persen penduduk menerima pendapatan paling rendah, 40 persen penduduk menerima pendapatan menengah, 20 persen penduduk menerima pendapatan paling tinggi. Kedua: distribusi pendapatan mutlak adalah persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari pendapatannya. Ukuran umum yang dipakai biasanya adalah kriteria bank dunia yaitu ketidakmerataan tertinggi bila 40 persen penduduk dengan distribusi pendapatan terendah menerima kurang dari 20 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan yang sedang, bila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12-17 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan yang rendah bila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari seluruh pendapatan nasional.²²

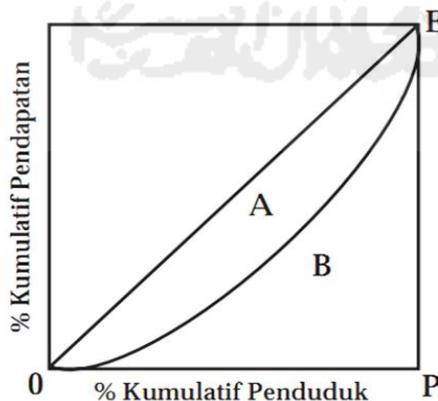
Ada beberapa cara yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur pemerataan distribusi pendapatan salah satunya adalah Kurva Lorenz. Dimana Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional dikalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak didalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya,

²²*Ibid.* hlm. 11

jika Kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata.²³

Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan biasa juga digunakan koefisien Gini, dimana pada koefisien Gini bernilai antara 0 (nol) sampai 1 (satu) yang merupakan rasio antara luas area antara kurva Lorenz dengan garis pemerataan sempurna dengan luas area di bawah kurva Lorenz. Jadi koefisien Gini yang rendah mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan semakin merata, sebaliknya semakin besar koefisien Gini mengindikasikan distribusi yang semakin timpang (senjang) antar kelompok menerima pendapatan. Secara ekstrim diartikan bahwa koefisien Gini sebesar 0 (nol) berarti terdapat pemerataan sempurna (setiap orang memperoleh pendapatan yang sama persis) koefisien Gini sebesar 1 (satu) menunjukkan ketidakmerataan sempurna (dimana satu orang memiliki/menguasai seluruh pendapatan totalnya, sementara lainnya tidak memperoleh pendapatan sama sekali).²⁴

Gambar 2.1. Kurva Lorenz



²³ *Ibid.* hlm. 13

²⁴ *Ibid.*

4. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pendapatan

Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab ketidakmerataan antar daerah. Pertama, adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. Kedua, adanya perbedaan kualitas sumber daya yang dimiliki, meliputi tanah (yang biasa ditanami), minyak dan gas, hutan, air dan bahan mineral lainnya. Ketersediaan sumber daya alam tersebut bagi suatu daerah merupakan sumber bagi pendapatan daerah tersebut, dengan demikian biasa diartikan juga bahwa semakin banyak sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut, dan biasa dikatakan semakin besar tingkat kemakmuran masyarakatnya. Kenyataan yang ada menunjukkan tidak semua daerah memiliki potensi sumber daya alam yang sama, bahkan cenderung berbeda satu sama lain, hal tersebut menunjukkan kesenjangan pendapatan antar daerah.²⁵

Perbedaan yang kedua yang terkait sumber daya manusia, meliputi kualitas tenaga kerja, keterampilan, pengetahuan dan disiplin kerja. Faktor ini merupakan faktor terpenting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sayangnya tidak semua daerah didukung dengan sumber daya manusia yang memadai dan satu sama lain, hal ini bisa dikarenakan perbedaan budaya, kebiasaan dan adat istiadat yang ada di masing-masing daerah.

Perbedaan akses modal, modal disini berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Pembentukan modal dapat berarti masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak, tetapi

²⁵ Shrap., *Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pendapatan*, (Jakarta: BPFE. 2004), hlm 58.

mengarahkan sebagian dari pendapatan untuk pembuatan barang modal, alat-alat, perlengkapan, mesin dan fasilitas pengangkutan, pabrik dan peralatannya, hal ini tentunya bisa dikaitkan dengan kemampuan menabung masyarakat. Tinggi rendahnya tingkat kemampuan menabung masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: budaya menabung masyarakat dan tingkat pendapatan masyarakat yang tentunya tiap daerah berbeda, serta lembaga keuangan dengan berbagai alasan masih sering berpihak pada daerah maju untuk kemudahan akses modal, sehingga daerah miskin sukar memperoleh akses terhadap modal.²⁶

Aspek yang lain yaitu: kekuatan pasar, migrasi dan kegiatan perdagangan merupakan beberapa hal yang menyebabkan ketidakmerataan itu semakin melebar. Kekuatan pasar apabila dibiarkan tanpa campur tangan pemerintah akan mendorong adanya perbedaan pertumbuhan wilayah, disatu sisi akan terdapat daerah yang sangat maju, namun disisi lain akan ada daerah tertinggal. Daerah yang maju akan menarik migrasi yang bersifat selektif sehingga akan menguntungkan daerah tersebut, dan memperburuk daerah yang tertinggal karena tenaga kerja yang mempunyai keunggulan akan lari ke daerah berkembang. Kegiatan perdagangan akan cenderung menguntungkan daerah maju dan merugikan daerah yang tertinggal, karena perluasan pasar seringkali memberi keuntungan yang sedemikian rupa kepada daerah maju sehingga daerah-daerah lain terhambat pertumbuhannya.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Mydra. *Analisis Kesenjangan Pendapatan*. Edisi Ketiga. (Jakarta: LPFUI. 2002), hlm.270

5. Efek Disparitas Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Menurut Kuncoro dan Sukirno, kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugerah awal (endowment factor). Perbedaan inilah yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan jurang kesejahteraan di berbagai wilayah.

Kesenjangan pendapatan di daerah ditentukan oleh tingkat kemajuan pembangunan ekonomi yang ditunjukkan oleh ukuran Negara, sumber daya alam, dan kebijakan yang dianut. Dengan kata lain, faktor kebijakan dan dimensi struktural perlu diperhatikan selain laju pertumbuhan ekonomi.²⁸

Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan mengakibatkan pengaruh yang merugikan (backwash effects) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (spread effects) yang dalam hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan kesenjangan antar daerah.

Kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Kesenjangan dapat dibedakan menurut wilayah, daerah, pendapatan, dan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah. Kesenjangan ini disebabkan oleh faktor-faktor, antara lain: tingkat pembangunan antar daerah yang berbeda-beda dan juga jenis pembangunan ekonomi. Disamping itu, kesenjangan antar daerah disebabkan karena adanya pelaku-pelaku ekonomi yang memiliki

²⁸ Kuncoro., *Kesenjangan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 56

kekuatan pasar yang mengakibatkan kesenjangan antar daerah tersebut dapat meningkat.²⁹

Bila sebagian besar hasil pembangunan ekonomi di suatu wilayah dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk atau masyarakat, maka keadaan demikian dikatakan bahwa tingkat pendapatan di wilayah tersebut dalam keadaan seimbang. Akan tetapi apabila sebaliknya, yaitu sebagian besar pendapatan hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk atau masyarakat maka hal ini dikatakan bahwa terjadi ketidakseimbangan atau ketimpangan pemerataan pendapatan.

6. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan keseluruhan nilai produksi barang dan jasa di wilayah tersebut, dimana secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut yaitu: kenaikan keseluruhan nilai tambah (*value added*) yang terjadi. Hal ini terlihat pada PDRB daerah yang merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, ini berarti besarnya PDRB yang dihasilkan suatu daerah secara kasar dapat menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, jadi presentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari presentase pertambahan penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Dalam upaya untuk

²⁹ Mydra. *Analisis Kesenjangan Pendapatan*. Edisi Ketiga. (Jakarta: LPFUI. 2002), hlm.270

meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah diperlukan kemampuan untuk menganalisis potensi ekonomi wilayah, yaitu terkait dengan menentukan sektor-sektor riil yang perlu dikembangkan agar perekonomian wilayah tumbuh cepat dan disisi lain mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut. Untuk menganalisis potensi ekonomi wilayah dapat digunakan analisis Location Quotient (LQ) yaitu suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu wilayah kabupaten kota dengan peranan sektor yang sama di wilayah provinsi dalam hal ini yang diperbandingkan adalah nilai tambah yang lebih besar, dalam hal ini yang diperbandingkan adalah nilai tambah sektor tertentu di kabupaten kota dengan nilai tambah sektor sama di tingkat provinsi.³⁰

Pembangunan ekonomi daerah pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu daerah meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi daerah juga mencakup proses pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih baik, mengembangkan pasar-pasar yang baru. Kesemuanya ini dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah dan jenis peluang kerja unruk masyarakat di daerah yang bersangkutan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah

³⁰Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Edisi 1. (Yogyakarta: BPFE, 1992). hlm. 46

daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif untuk mendorong pembangunan daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memfasilitasi dan mengembangkan partisipasi masyarakat dengan menggunakan potensi sumber daya yang ada harus dan mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.³¹

Pembangunan ekonomi oleh beberapa ahli ekonomi dibedakan pengertiannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai pertama: Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, yaitu tingkat pertambahan GDP/GNP pada suatu tingkat tertentu melebihi tingkat pertambahan penduduk. Kedua: Perkembangan GDP/GNP yang berlaku dalam suatu daerah/negara diikuti oleh perubahan dan modernisasi struktur ekonominya.

7. Strategi Ekonomi Pembangunan Dalam Islam

Pandangan hidup Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu *tauhid* (keesaan Allah), *khilafah*, dan keadilan (*adalah*). *Tauhid* adalah konsep yang paling penting diantara ketiganya, sebab konsep kedua lainnya merupakan turunan logika. *Tauhid* mengandung implikasi bahwa alam semesta secara sadar dibentuk dan diciptakan oleh Tuhan Yang Mahakuasa, Maha Esa dan Unik serta karena itu tidak mungkin jagad raya ini muncul secara kebetulan (Ali Imran:191. Shad:27, dan al-Mu'minin:15). Segala sesuatu yang Dia

³¹ Arsyad, L. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.1999), hlm, 2-5

ciptakan mempunyai satu tujuan. Konsep *tauhid* bukanlah sekedar pengakuan realitas, tetapi juga suatu respon aktif terhadapnya.

Manusia adalah *khalifah* Allah di muka bumi. Sebagai *khalifah* Allah, manusia bertanggung jawab kepada-Nya, dan mereka akan diberi pahala atau siksa di akhirat kelak berdasarkan kehidupan mereka di dunia ini. Oleh karena itu setiap orang tanpa melihat ras, kelompok atau negara tertentu, adalah *khalifah*, dan pada dasarnya *khalifah* mengandung makna persatuan fundamental dan persaudaraan umat manusia. Konsep persaudaraan ini akan menjadi konsep yang kosong tanpa dibarengi dengan konsep keadilan '*adalah*'. Oleh karena itu pula, menegakkan keadilan dinyatakan oleh al-Quran sebagai salah satu tujuan utama yang akan dicapai oleh para Rasul.³² Komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam.

Pandangan dunia Islam membebani suatu kewajiban moral bagi setiap warga masyarakat untuk berusaha semaksimal mungkin mengembangkan persaudaraan dan keadilan sosio ekonomi sedemikian rupa sehingga realisasinya menjadi karakteristik yang menonjol pada masyarakat itu.³³

Bagaimana strategi Islam ini, Umar Chapra menguraikan dalam elemen-elemen strategis yang penting, berikut ini.³⁴

³² Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Penerjemah Ikhwan Abidin B. Judul asli "*Islam and Economic Development*". (Jakarta: Gema Insani Press, 2000). hlm. 6-7

³³ *Ibid.* hlm. 79

³⁴ *Ibid.* hlm. 150

1) Pembangunan Maanusia

Penyaringan yang merata atas klaim yang berlebihan: selain mekanisme harga, Islam menawarkan moral sebagai filter untuk mengubah skala preferensi manusia supaya mengikuti prioritas-prioritas sosial.

Motivasi : memotivasi individu untuk melayani kepentingan sosial seiring dengan filter moral meskipun ketika berbuat demikian merugikan kepentingannya sendiri. Maslahat individu dapat dipenuhi dengan nafsu keakuannya, namun maslahat di akhirat tidak akan dipenuhi kecuali dengan berperilaku yang tidak merugikan orang lain. Gagasan mengenai pertanggungjawaban di depan Allah dapat menjadi motivasi kuat bagi individu untuk mematuhi nilai moral dan mencegah mereka mengikuti nafsu melebihi batas norma sosial dan kesejahteraan.

2) Mengurangi Pemusatan Kekayaan

3) Restrukturisasi sosio ekonomi: bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi penerapan nilai-nilai tersebut diatas.

4) Restruktur Ekonomi

5) Perencanaan yang strategis

8. Keadilan dalam Ekonomi Islam

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat al-Quran dan sunnah Rasul tapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam, di

mana alam diciptakan berdasarkan prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para kerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dan pembasmian bentuk diskriminasi telah ditekankan oleh al-Quran dan bahkan salah satu tujuan utama risalah kenabian itu adalah penegakan keadilan.³⁵

Hak antara para pekerja (kaum proletar) dan pemilik modal (kaum borjuasi) sama dalam pengertian proporsionalitas, kaum borjuis tidak menggunakan secara sewenang-wenang haknya, yaitu dengan mengorbankan hak orang lain untuk mewujudkan dan merealisasikan yang menjadi haknya, yaitu dengan menghalalkan segala cara, supaya dia tidak mengalami kerugian. Dengan adanya pendiskriminasian terhadap kaum proletar lahir suatu gerakan perlawanan yang dilakukan oleh kaum proletar atau kaum pekerja yang dipelopori oleh Karl Marx pada masanya. Menurut Umar Chapra, dilihat dari aspek aqidah Islam al-Qur'an menempatkan keadilan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Keadilan dalam pembangunan ekonomi masyarakat penting untuk diwujudkan karena tanpa keadilan kebenaran itu akan sulit diwujudkan dan terealisasi dengan baik. Pemerintahan yang otoriter dan sewenang-wenang dalam membuat kebijakan tanpa melihat keadaan masyarakat, yaitu dalam artian bisa mensinergiskan antara kepentingan Negara dan kepentingan rakyat.

³⁵ Muslimin, Kara. *Bank Syariah Di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005). hlm. 43.

Kegiatan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksudkan bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan bathin, individu dan masyarakat. Kesejahteraan manusia telah menjadi tujuan seluruh masyarakat. Bagaimanapun tetap ada suatu perbedaan pendapat mengenai apakah kesejahteraan itu dan bagaimana dia dapat diwujudkan. Sekalipun prasyarat materi bukan menjadi satu-satunya unsur kesejahteraan. Tujuan-tujuan ini meliputi: penghapusan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan pokok materi dari semua individu. Tersedia untuk setiap orang setiap kesempatan untuk mendapatkan nafkah yang jujur, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.³⁶

Keseimbangan dalam ekonomi Islam juga mengandung makna keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki Negara dari hasil pendapatan Negara. Seperti: zakat. Shadaqah, ghanimah (harta rampasan perang), fa'i (harta rampasan perang yang tidak melalui peperangan), kharaj (pajak atas daerah yang ditaklukkan dalam perang), 'ushr (zakat tanaman) dan sebagainya. Keseimbangan dalam pendistribusian tersebut tidak secara terperinci disebutkan dalam Al-Qur'an tetapi dipraktekkan pada masa awal Islam.³⁷

³⁶ M.Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 1.

³⁷ Muslimin Kara, *Bank Syariah Di Indonesia*,. hlm. 40-41.

Tujuan ekonomi Islam membawa kepada konsep al-falah (kejayaan) di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi sekuler untuk kepuasan di dunia saja. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah di bumi ini dimana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit adalah diperuntukkan untuk manusia kesemuanya bertujuan untuk beribadah kepada Allah swt.³⁸ Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan insani. Disebut ekonomi Rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiah. Dikatakan sebagai ekonomi insan karena sistem ini dilaksanakan dan diajukan untuk kemakmuran manusia. Sedangkan Umer Chapra menyebutnya dengan ekonomi tauhid. Cerminan watak “ketuhanan” ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya sebab pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek aturan yang harus dipedomani oleh para pakar ekonomi. Dalam ekonomi Islam sumber daya Insani menjadi faktor terpenting, manusia menjadi pusat sirkulasi manfaat ekonomi dari berbagai sumber daya yang ada.³⁹ Semua karakter ekonomi di atas mengacu pada karakter dasar ekonomi Islam sebagai ummatan wasathan (umat moderat).

Pengertian wasathan dari sejumlah kitab tafsir, lebih dari satu kata konotasi makna, yang pertama maknanya tawassuth’= moderat, kedua bermakna Tawazun= seimbang (balance), ketiga bermakna, Tasamuh= terbaik dan alternatif. Keseluruhan tafsir ini mengindikasikan bahwa dalam Islam dan ekonomi Islam tidak ada tapi untuk ekstremitas, kapitalis maupun sosialis. Ekonomi Islam member penghargaan yang tinggi kepada orang kaya yang

³⁸ Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, (Cet; 2 Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 9.

³⁹ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan*,. hlm. 13.

mendapatkan dan mengelola hartanya secara besar, tetapi juga sangat peduli untuk memberdayakan kaum miskin. Politik ekonomi tidak pernah segan untuk menindak orang kaya yang tidak menunaikan hak-hak sosial dari hartanya, dan mengatur fuqara atau orang miskin yang malas dan selalu meminta belas kasihan orang lain.⁴⁰

Dalam Islam kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga di alokasikan sedemikian rupa. Karakter ekonomi semacam ini merupakan turunan dari karakter umat Islam sebagai umat moderat (*ummatan wasatan*), sebagai umat moderat kini manusia mengemban tugas sebagai *syuhada*, yakni acuan dari kebenaran dan standar kebaikan bagi umat manusia. Allah swt telah menetapkan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi. Allah Swt telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Perilaku mereka yang ditetapkan dalam hukum Allah (*syariah*) harus diawasi masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan Islam. Yang dimaksud dengan istilah ini adalah perangkat perintah dan aturan sosial dan politik, agama, moral dan hukum yang mengikat masyarakat. Lembaga-lembaga sosial di susun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu sehingga mereka melaksanakan aturan yang disyariatkan oleh al-Quran dan hadis, mengontrol serta mengawasi berjalannya aturan-aturan tersebut.

⁴⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Cet. 3; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.13-14.

Berlakunya aturan ini membentuk lingkungan di mana para individu melakukan kegiatan ekonomi mereka. Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungannya dengan kekuatan tertinggi (Tuhan), kehidupan sesama manusia, dunia, sesama makhluk dan tujuan akhir manusia. Uraian di bawah ini hanya akan menjelaskan beberapa aturan “permainan” ekonomi Islam itu tanpa mendalami berbagai implikasi yang timbul daripadanya, karena (hal itu) berada di luar cakupan uraian ini. Beberapa aturan itu di antaranya:

- 1) Alam semesta termasuk manusia adalah milik Allah yang memiliki kedaulatan dan mengatur dan mengolah alam semesta yang telah dititipkan oleh Allah untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya.
- 2) Allah telah mengatur kehidupan dan perilaku manusia dengan batas-batas tertentu sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.
- 3) Semua manusia tergantung kepada Allah. Semakin tinggi tingkat ketaatan manusia maka tingkat ketergantungannya kepada Allah akan tinggi dan dia akan semakin dicintai oleh Allah.
- 4) Status khalifah atau pengembalian amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia. Tidak ada istimewa bagi individu atau bangsa tertentu.⁴¹

⁴¹ Mustafa Edwin Nasution, *op.cit.*, hlm. 3-4.

Karakteristik yang perlu dipahami dalam ekonomi Islam di antaranya: Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi Islam (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam, membantu para ekonom Muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam, membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Sedangkan sumber karakteristik ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas aqidah, akhlak dan asas hukum.⁴²

⁴²*Ibid.*, hlm. 18.